

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2016

BIRO HUMAS



SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2016 ini sendiri merupakan laporan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk komitmen Biro Humas mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas Biro Humas yang berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap Bagian di lingkungan internal Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kinerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat diukur atas dasar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Humas Tahun 2016.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena keberhasilan pencapaian sasaran sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur daerah, masyarakat, dunia usaha, dan *civil society* sebagai bagian integral yang saling menopang dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Biro Humas Tahun 2016 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan internal Biro Humas pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Biro Humas dalam mewujudkan *Good Government* dan *Clean Government* yang dicita-citakan.

Kepala Biro Humas

Drs.Jasman, MM
Pembina Tk.I
Nip.19680101 198809 1 001

BAB I PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga kegiatan Biro Humas tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan didalam setiap kegiatan Biro Humas sesuai dengan permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Saat ini dinamika tuntutan dan tantangan Biro Humas dalam perkembangan teknologi informasi global terus mengalami peningkatan yang luar biasa dari tahun ke tahun, dimana perkembangan informasi dunia akan dapat kita nikmati setiap detik dimana pun kita berada. Kecanggihan informasi juga telah membawa perubahan dalam dunia pendidikan dan pertumbuhan ekonomi serta sektor kehidupan lainnya.

Kemudian kegiatan kehumasan, Komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintah daerah juga mempedomani Sasaran pokok arah kebijakan RPJP Provinsi tahun 2005 – 2025 pada tahapan RPJM ke 3 (2016 – 2020) secara umum adalah peningkatan daya saing produk dan hubungan regional, pengembangan pariwisata dan industri kecil, Penuntasan wajib belajar 12 tahun.

Dari kondisi ini sebagaimana tuntutan, tantangan serta didukung oleh peran, fungsi dan tugas pokok kegiatan kehumasan, komunikasi dan informasi yang disampaikan di atas di Biro Humas dalam penyusunan Renja tahun 2016 ini, juga mengacu pada Permendagri nomor 54 tahun 2010 yang pada pasal 134, Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e memuat : a) Program dan kegiatan, b) lokasi kegiatan, c) Indikator Kinerja, d) Kelompok Sosial dan e) pagu indikator dan perkiraan maju.

I.2. ORGANISASI BIRO HUMAS

I.2.1. Kedudukan

Biro Humas merupakan satu dari 9 (sembilan) Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan uraian tugas Eselon IV pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Biro Humas merupakan unsur staf Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

I.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Organisasi Tata Kerja Biro Humas dibentuk berdasarkan, Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan ini juga didukung oleh Pergub Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2013 tentang uraian peran, fungsi dan tugas Pokok Biro Humas.

Biro Humas merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan uraian tugas Eselon IV pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Biro Humas merupakan unsur staf Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas – tugas Asisten pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Biro Humas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi hubungan masyarakat.

Tugas :

Biro Humas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Biro Humas mempunyai fungsi :

Fungsi :

Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat;
Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat;
Penyelenggaraan, pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat;

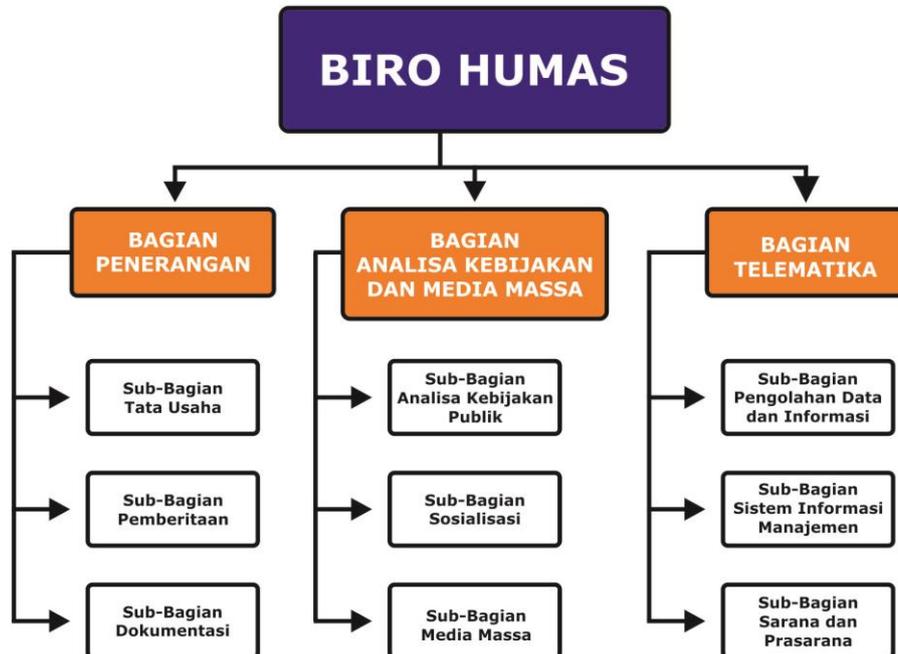
Rincian tugas Biro Humas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Humas;
2. Merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi hubungan masyarakat;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat;
4. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi hubungan masyarakat;
5. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro;
6. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Biro;
7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Humas;
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.2.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Humasmempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

**Bagan I.1:
Struktur Organisasi Biro Humas**



Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi tiga Bagian dan sembilan Sub-Bagian sebagaimana berikut:

1. Bagian Penerangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 Sub-Bagian yaitu Tata Usaha Biro, Dokumentasi dan Pemberitaan.
2. Bagian Analisa Kebijakan dan Media Massa yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 Sub-Bagian yaitu Analisa Kebijakan, Sosialisasi dan Media Massa.
3. Bagian Telematika yang dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang membawahi 3 Sub-Bagian yaitu Sistem Informasi Manajemen, Pengolahan dan Penyajian Data, Sarana dan Prasarana Telematika.

I.II. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

I.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Humas

1. Masih rendahnya dukungan dan perhatian SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar dalam memberikan data dan informasi program/kegiatan,

- sehingga potensi dan kemajuan penyelenggaraan pembangunan belum tersosialisasi dan terinformasi secara maksimal kepada masyarakat/khalayak umum;
2. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan SDM aparat Humas mengenai tugas dan fungsi pelayanan kehumasan daerah, analisa, dan informasi teknologi sehingga kinerja Biro Humas belum terwujud secara optimal;
 3. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi baik dari segi teknologi *hardware* maupun *software* dalam meningkatkan kinerja Biro Humas;
 4. Lemahnya sistem koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan Biro Humas dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, sehingga penyebaran informasi belum dapat berjalan secara baik dan optimal;
 5. Belum adanya *Standard of Procedure* (SOP) dalam setiap pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan;
 6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang operasional kegiatan Biro Humas sehingga pencapaian target kinerja sulit diwujudkan secara maksimal.

I.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di Tingkat Provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah 'Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera'. Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, salah satunya **(Misi 2)** : 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional' yang dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk **meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel** dengan sasaran **"meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan"**.

Biro Humas adalah salah satu unit kerja termasuk penanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi dalam RPJMD 2016-2021.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Misi 2 pemerintah Provinsi ini, Biro Humas dalam hal ini telah menyusun Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan akan

diwujudkan dengan penerapan sejumlah sasaran strategi yang mengacu pada RPJMD 2016-2021 . Dua di antaranya yakni :

1. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan nilai indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat.penyelenggaraan *e-Government*.

Untuk sasaran strategis 'Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat 'indikator kinerja ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terkait langsung dan sekaligus menjadi indikator kinerja utama Biro Humas yakni untuk mencapai indeks keterbukaan informasi publik.

Dan untuk Sasaran strategis "Meningkatkan nilai indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah provinsi menetapkan indikator kinerja guna pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik dengan menetapkan suatu ukuran yang mesti dicapai 5 tahun terhadap penyelenggaraan *e-Government di Provinsi Sumatera Barat*.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas menerjemahkan Visi Pembangunan tersebut ke dalam Visi Pembangunan Biro Humas Tahun 2016-2021, yakni:

"Terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien"

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan ini, Biro Humas menetapkan dua Misi, sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;**
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

IV.2 TUJUAN DAN SASARAN

Guna menindaklanjuti dua misi Tersebut, Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Renstra Biro Humas 2016-2021, sebagai berikut:

Tujuan Misi 1:

1. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah;**
2. **Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat.**

Tujuan Misi 2:

1. **Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

Sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tujuan 1 Misi 1 'Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah', yakni: **Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.**
2. Berdasarkan tujuan 1 Misi 2 'Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat', yakni: **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.**
3. Berdasarkan Tujuan 2 Misi 1 'Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi', yakni: **Tersedianya layanane-Government Provinsi Sumatera Barat yang terintegrasi.**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Biro Humas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat; dan

3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat.

Berdasarkan telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, agenda pembangunan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan berbagai program yang akan dicapai. Program-program RPJMD yang terkait dengan peran, tugas pokok dan fungsi Biro Humas adalah:

1. Program pengembangan komunikasi dan informatika
2. Program informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Komunikasi dan Informatika
4. Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
5. Program e-Government Daerah

Tabel I.1. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dengan Program Kerja Biro Humas

MISI	Tujuan	PRIORITAS	PROGRAM KERJA
Meningkatkan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan komunikasi dan informatika 2. Program informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Komunikasi dan Informatika 4. Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan 5. Program e-Government Daerah

I.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, terutama dalam konteks Penyebarluasan Informasi baik Informasi Pemerintahan Daerah maupun Informasi Nasional, Biro Humas pada dasarnya perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat - dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika- oleh Pemerintah Provinsi - dalam hal ini, Biro Humas- setelah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi yang didiseminasikan, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang

disampaikan kepada Pemerintah Pusat -dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah cenderung terhambat.

Dalam konteks yang sama, Biro Humas seyogyanya menjalin kerjasama dengan SKPD yang bertanggungjawab di Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat akar rumput;
2. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* Provinsi Sumatera Barat dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting.

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan sejak 2011 lalu, namun proses penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat, Pengelolaan Daftar Informasi Publik, dan Pengembangan *e-Government* antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih terkesan tidak berjalan pada satu rel yang sama.

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Biro Humas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

1. Batasan Tugas Pokok dan Fungsi yang kabur antara Biro Humas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kebijakan atau program dan kegiatan yang dapat berujung pada inefisiensi;

2. Rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi kehumasan;
3. Sempitnya kewenangan Biro Humas dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah;
4. Apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
6. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sumatera Barat yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;
7. Belum terintegrasinya *database* dan layanan *e-Government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk -baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terutama pada Misi 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional', Tujuan 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, dan Akuntabel', Sasaran 1 'Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan, Transparansi, dan Akuntabilitas', Indikator 6 dan 7, yakni 'Indeks *e-Government* Provinsi Sumatera Barat' dan 'Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat';
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 di Bidang Pembangunan Hukum dan Pemerintahan pada fokus; Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Birokrasi dan Pengelolaan Sistem *Database* untuk Lingkungan Internal dan Eksternal Pemerintah;
3. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni 'Membuat pemerintah selalu

hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya’.

4. Komitmen Negara Republik Indonesia mengadopsi dan melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Agenda Pembangunan Global yang baru untuk periode 2016-2030 guna meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* - MDGs), terutama pada Tujuan ke-16 SDGs yang secara spesifik menggariskan negara-negara yang mengadopsi untuk “*Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels*” dengan sejumlah target yang mengedepankan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, antara lain:
 - *Develop effective, accountable, and transparent institutions at all levels;*
 - *Ensure responsive, inclusive, participatory, and representative decision-making at all levels;*
 - *Ensure public access to information.*

I.2.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan ; pada bagian ini menjelaskan tengah latar belakang, organisasi Biro Humas dan Tugas dan Fungsi Biro Humas, Sistematika Penulisan.

BAB II : Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Perencanaan
- 2.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.3 Penetapan Kinerja
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan kegiatan Masyarakat

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 PERENCANAAN

Rencana Startegis 2016 – 2021 (Renstra) Biro Humas mengacu pada pre kondisi global, nasional dan lokal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Biro Humas menyusun Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.sebagai acuan perumausan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Humas untuk lima tahun mendatang.

Renstra Biro Humas ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehumasan dan Komunikasi & Informatika sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021,Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2021, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta *trend* komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIKtersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021, visi Gubernur Sumatera Barat yang ingin diwujudkan adalah :

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Visi Gubernur Sumatera Barat ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;

5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi kedua, 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional', dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan penerapan sejumlah Strategi antara lain :

1. Melanjutkan Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM pengadaan barang dan jasa,
5. Meningkatkan kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa,
6. Meningkatkan Penerapan sistem *whistleblowing*,
7. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,
8. Meningkatkan penyelenggaraan *e-Government*,
9. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat,
10. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Dua dari sepuluh Strategi di atas Poin 8 dan 9- sepenuhnya akan diupayakan oleh Biro Humas. Untuk itu, Biro Humas merumuskan Arah Kebijakan yang akan diambil demi memastikan peningkatan yang diharapkan guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagaimana dicita-citakan pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Tabel II.1**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

VISI	Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera			
	No.	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR
PENGHAMBAT				PENDORONG
1.	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional	Tuntutan pelayanan informasi Publik	Kurangnya sarana dan prasarana	Kemajuan Teknologi Informasi
		Belum Maksimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	SDM masih Terbatas	Kebijakan Pemerintah

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas mengacu pada misi ke dua Pembangunan Sumatera Barat 2016-2021 yaitu : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.

Misi kedua tersebut dijabarkan kedalam visi Biro Humas tahun 2016 – 2021 yakni :

“Terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien”

Untuk Mewujudkan Visi Biro Humas ini , ditetapkan dua misi Biro Humas Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Guna menindaklanjuti dua misi Tersebut, Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Renstra Biro Humas 2016-2021, sebagai berikut:

Tujuan Misi 1:

1. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah;**
2. **Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat.**

Tujuan Misi 2:

1. **Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

Sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tujuan 1 Misi 1 'Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah', yakni: **Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.**
2. Berdasarkan tujuan 1 Misi 2 'Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat', yakni: **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.**
3. Berdasarkan Tujuan 2 Misi 1 'Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi', yakni: **Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat**

Dari tujuan dan saran yang hendak dicapai tersebut diatas disusun sasaran strategis Biro Humas yang digambarkan dalam tabel II.2 berikut ini:

Tabel II.2 Penetapan Tujuan,SasaranStrategis Biro Humas Tahun 2016

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyediaan informasi faktual dan berkualitas yang dapat diakses publik dengan mudah. 2. Mewujudkan masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dengan penyediaan informasi publik dan kanal komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi Sumatera Barat 2. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat
2.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2012 tentang rincian Tugas pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera barat, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Biro Humas mempunyai Fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat.

Berdasarkan telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, agenda pembangunan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan berbagai program yang akan dicapai. Program program RPJMD yang terkait dengan peran, tugas pokok dari Biro Humas adalah :

1. Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

2. Program Informasi dan komunikasi Publik
3. Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
4. Program pengembangan komunikasi dan informatika
5. Program pengelolaan e- Government pemerintah daerah.

Tabel II.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Kegiatan Biro Humas tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan provinsi Sumatera Barat.	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah
2.	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1. Informasi dan Komunikasi Publik 2. Pengembangan Komunikasi dan Informatika
3	Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	1. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah

Tabel II.3 . Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat 2016 -2021 dengan Program Kerja Biro Humas

MISI	TUJUAN	PRIORITAS	PROGRAM KERJA
Meningkatkan tata pemerintah yang baik, bersih dan profesional	Meningkatkan Tata pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Program pengembangan komunikasi dan informatika; 2. Program Informasi dan komunikasi Publik; 3. Program komunikasi dan informatika; 4. Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan; 5. Program e- Government Daerah.

2.3 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah persyaratan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah. Penetapan kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun terakhir Renstra Biro Humas, sehingga capaian kinerja tahun 2016 mencerminkan capaian akhir Renstra 2010-2015.

Di tahun ini, Biro Humas melaksanakan 8 Program dan 38 Kegiatan dengan total Anggaran sebesar **Rp9.141.973.000,-** Pada APBD Perubahan 2016, Biro Humas mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian didistribusikan pada 10 (sepuluh) kegiatan; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Pengadaan Meubeleur, Pengadaan Komputer, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD, Pengelola Pelayanan Informasi Publik, Liputan, Penyebarluasan Pembangunan Media Cetak, Penyebarluasan Pembangunan Media Elektronik, pengelolaan Website sehingga total Anggaran Biro Humas setelah perubahan menjadi sebesar **RP.9.940.624.000,-**.

Secara umum, seluruh anggaran ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan guna mencapai 3 sasaran yang disepakati dalam dokumen penetapan kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD 2016-2021.

1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat.

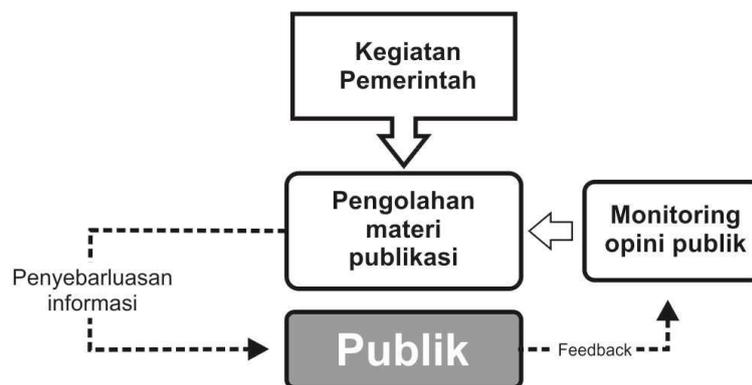
Landasan dan dasar ditetapkannya 3 sasaran di atas, program/kegiatan digagas untuk menuju sasaran tersebut, target dan indikator penilaian yang hendak dicapai dari masing-masing program/kegiatan dijabarkan dalam sub-bab berikut.

II.1. MENINGKATNYA PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Humas Pemerintah memiliki tugas memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, terdapat empat kegiatan utama yang harus dilakukan untuk memenuhi tugas pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri di atas, yakni; pengumpulan informasi, pengolahan materi publikasi, penyebaran informasi, dan *monitoring* respon/opini atas informasi yang disebarluaskan. Secara garis besar, keseluruhan proses tergambar dalam bagan berikut:

Bagan II.1. Proses penyebaran dan penyerapan informasi pemerintah



Publik, dalam arti luas merupakan *stakeholder* pemerintah yang harus dilayani dan diberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di manapun, tidak terkecuali pemerintahan daerah Prov. Sumatera Barat. Dalam konteks ini, Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut persepsi publik akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dalam setiap kebijakan pembangunan yang hendak ditempuh. Bagaimanapun, penyelenggaraan pemerintahan yang telah diupayakan semaksimal mungkin sekalipun tetap memiliki peluang untuk tidak dipercayai oleh publiknya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai penyelenggaraan

pemerintahan yang sampai ke publik yang seringkali berujung pada terbentuknya opini bahwa pemerintah tidak terbuka/transparan.

Untuk mereduksi kemungkinan terbentuknya opini negatif sebagaimana dijelaskan di paragraf sebelum ini ke titik terendahnya, dan demi memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan tetap besar, Biro Humas berupaya untuk memberikan sebanyak mungkin informasi baik, berkualitas, dan berimbang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan kepada publik melalui sebanyak mungkin kanal informasi massa yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Kegiatan yang digagas untuk mendukung tercapainya sasaran pertama ini yakni Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah (khususnya aktivitas pembangunan yang diikuti oleh Kepala Daerah) untuk kemudian dikonversi menjadi materi publikasi yang akan disebarakan melalui media cetak, media elektronik (TV dan Radio), dan media luar ruang. **Capaian Kinerja kegiatan Liputan Pemerintah Daerah ini diukur dengan menghitung persentase kegiatan Kepala Daerah yang diliput dari total keseluruhan kegiatan Kepala Daerah dengan target capaian sebesar 80%. Untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan penyebarluasan informasinya sendiri dihitung dengan membagi jumlah dan jenis sektor pembangunan yang dipublikasikan dengan jumlah sektor pembangunan yang ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dengan target publikasi; 40 % media cetak, 40% media luar ruang, dan 40% media elektronik.**

Muara yang diharapkan dari kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik tadi yakni terjaganya pemberitaan positif terkait kinerja pemerintah daerah di berbagai media massa independen. Untuk mengukur hal ini, maka digagas **kegiatan Pengkajian Analisa Informasi Pemberitaan yang berbentuk pemantauan *tone* dan isi pemberitaan serta opini masyarakat di 7 media cetak besar daerah Sumbar setiap hari. Ditargetkan, ratio pemberitaan ideal terkait Pemerintah Provinsi sebesar 40 % berita positif dan netral 40 % berbanding 20% berita negatif.** Ratio ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pemerintahan demokratis yang baik adalah pemerintahan yang tetap membuka pintu untuk kritik dan kontrol yang datang dari luar.

Dari keseluruhan kegiatan tersebut diatas Biro Humas berupaya meningkatkan produktifitas penyebaran informasi pemerintah daerah menargetkan penilaian ranking 15 di tingkat nasional.

II.2. MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Informasi Publik, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya. Badan Publik sendiri, dalam regulasi yang sama didefinisikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), juga dalam regulasi yang sama, diberi amanat sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID Biro Humas sebagai pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, dokumentasi, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik yang memiliki fungsi penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu untuk terus mendorong peningkatan pelayanannya kepada masyarakat dan siapapun yang membutuhkan informasi daerah untuk tujuan-tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tahun 2016, **PPID ditargetkan mampu melayani 80% dari seluruh permintaan pelayanan informasi yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.**Kinerja PPID sebagaimana dijelaskan di baris sebelumnya selanjutnya akan didukung dengan ketersediaan data digital untuk mengakomodir pihak-pihak yang ingin

mengakses informasi terkait penyelenggara/penyelenggaraan pemerintahan melalui internet. Data digital termaksud merupakan kompilasi dari informasi-informasi yang diinput oleh seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat ke *website* pemerintah provinsi yang pengelolaannya berada di bawah wewenang Biro Humas. Untuk menjamin ketersediaan data digital yang lengkap dan komprehensif, Tahun ini Biro Humas menetapkan indeks keterbukaan informasi publik 55.

II.3. MENINGKATNYA NILAI INDEKS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (TIK) PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi publik yang menjadi sasaran ketiga Biro Humas sejak tahun 2016 merujuk pada penggunaan aplikasi *e-Government* pada seluruh proses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

e-Government sendiri oleh Bank Dunia didefinisikan sebagai "*the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.*" Jika definisi ini bisa diadopsi, maka *e-Government* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai penggunaan teknologi informasi di lembaga pemerintah atau lembaga publik yang bertujuan agar hubungan dalam tata pemerintahan yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efisien, efektif, produktif dan responsif.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, yang diikuti dengan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga dari Kementerian Kominfo, maka sejak saat itu Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mulai menerapkan *e-Government*. Dijelaskan lebih lanjut dalam Inpres tersebut bahwa pengembangan *e-Government* dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan, yaitu:

1. Tingkat Persiapan, meliputi; Pembuatan situs informasi di setiap lembaga; Penyiapan SDM; Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, Warnet, *SME-Center*, dll; Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

2. Tingkat Pematangan, meliputi; Pembuatan situs informasi publik interaktif; Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Tingkat Pemantapan, meliputi; Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
4. Tingkat Pemanfaatan, meliputi; Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya telah memulai implementasi *e-Government* sejak tahun 2010 Hingga tahun 2014 namun penerapannya hanya terbatas pada tahap Persiapan dan Pematangan. **Pada tahun anggaran 2016, Biro Humas menambah aplikasi penunjang kegiatan internal dan beberapa aplikasi pelayanan publik dan menargetkan 80% dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan aplikasi-aplikasi ini.** Tahun 2016 ada tambahan aplikasi pelayanan publik.

Secara ringkas, Penetapan Kinerja bersama indikator kinerja dan target-target kinerja yang hendak dicapai serta besar anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1. Penetapan Kinerja Biro Humas Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera barat	Produktifitas Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	Rangking 15 besar Nasional	Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	2.323.967.000
				1. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah	750.000.000
				2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	748.339.000
				3. Penyebarluasan Informasi melalui Elektronik	360.851.000
				4. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	86.336.000
				5. Pembuatan Film Dokumentasi Potensi	35.000.000
				6. Penyebarluasan Informasi melalui media ruang	272.480.000
Informasi dan Komunikasi Publik					

				7. Pengkajian Analisis Pemberitaan	122.701.000
				8. Koordinasi Kehumasan	270.832.000
2	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	I. Informasi dan Komunikasi Publik	848.895.000
				9. Pengelola Pelayanan Informasi Publik	190.873.000
				10. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	73.000.000
				11. Pemberdayaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM)	45.871.000
				12. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional	146.068.000
				13. Bimtek Pelayanan Informasi Publik	68.500.000
				A. Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2.191.000.000
				13. Pengelolaan Website Pemprov. Sumbar	300.000.000
				14. Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	1.891.000.000
3	Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	2,2	Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah	2.463.159.000
				15. Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Kota	62.873.000
				16. Implementasi e-Government Pemprov Sumbar	2.330.434.000
				17. Implementasi Mobile Community Access Point (M-CAP)	69.852.016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

III.1.1. Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam LAKIP ini menggunakan metode perbandingan capaian kinerja dimana capaian kerja diukur dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diharapkan dapat tercapai dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor penunjang/penghambat capaian dan beberapa tindakan yang diperlukan untuk hasil yang lebih baik di masa mendatang. Hasil hitung dari metode ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Gambaran kepada pihak eksternal mengenai pelaksanaan kerja Biro Humas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Instrumen evaluasi bagi aparatur Biro Humas sendiri sebagai refleksi tingkat efisiensi dan produktifitas organisasi.

Dalam tahun anggaran 2016 Biro Humas mendapat alokasi anggaran Rp.9.141.973.000 setelah perubahan terjadi penambahan menjadi Rp,9.940.624.000. Seluruh anggaran digunakan untuk mencapai 3 sasaran strategi yang tercantum dalam Renstra 2016

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas tahun 2016, terdapat 3 Sasaran Strategis, yakni:

1. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat.

III.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan tabel :

Tabel III.1 : Indikator Kinerja (IKU) Biro Humas Tahun 2016

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Ket
1.	Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	
2.	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	
3	Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	

III.1.3. Hasil Pengukuran Kinerja

Sebagai wujud konsistensi, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Humas tahun 2016-2021 terus dilaksanakan dengan beberapa revisi disejumlah program/kegiatan untuk memenuhi tuntutan perubahan internal maupun eksternal, juga untuk mewujudkan pembaruan dan perbaikan kehumasan daerah.

Setiap sasaran strategis ini diukur pencapaian/tingkat keberhasilannya dengan indikator kinerja yang masing-masingnya telah ditetapkan target pemenuhannya. Dari perhitungan angka realisasi terhadap sasaran strategis dengan 3target indikator kinerja Biro Humas tahun 2016 tersebut.

Beberapa hal yang patut digarisbawahi dan dijadikan catatan dari nilai capaian rata-rata pada tahun anggaran 2016 ini, yakni:

1. Rendahnya tingkat realisasi indikator kinerja kegiatan `pengembangan sistem informasiterutama di indikator kinerja `persentase pemanfaatan teknologi informasi *e-Government*. (Faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi lebih lanjut akan dielaborasi di sub-bab III.3. Faktor Pendukung/Penghambat Capaian)

Gambaran umum Sasaran Strategis, Indikator Kerja, target dan realisasi kinerja, serta nilai capaian per indikator kinerja dan nilai rata-rata Capaian Kinerja Biro Humas tahun 2016 tersaji pada tabel hasil pengukuran di lembar berikut:

Tabel III.2. Hasil pengukuran kinerja Biro Humas

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	15 besar nasional	Peringkat 11
2	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	73,05
3	Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	2,2	<i>Belum di nilai oleh pemerintah Pusat</i>

III.1.4. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam Sub Bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis SKPD Biro Humas sesuai dengan hasil pengukuran sebagaimana tersaji dalam tabel Pengukuran Kinerja di atas. Demi tersusunnya ulasan yang runut dan tertata, elaborasi akan dilakukan terhadap setiap Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan urutan yang juga sama. Setiap elaborasi Sasaran Strategis akan dikomparasikan dengan:

1. Target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Biro Humas.

Dengan sejumlah perbandingan ini diharapkan poin-poin yang dihasilkan dapat digunakan sebagai masukan positif bagi perumusan dan implementasi Sasaran Strategis di tahun-tahun mendatang.

1.	Sasaran Strategis I	Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
-----------	----------------------------	---

Tolok ukur capaian sasaran strategis 'Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat' penilaian atas kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi. Dalam artian sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyebarkan sebanyak mungkin informasi baik terkait penyelenggaraan pemerintahan secara cepat, akurat, proposional, menarik, berimbang, serta selaras dengan dinamika publik. Kepercayaan publik tersebut dinilai melalui penerangan ekspos berita yang bekerja sama dengan sebuah lembaga survey; Intelligent Media Management (IMM).

Data ranking dari Intelligent Media Management (IMM) disampaikan dalam media monitoring yang dirilis setiap bulannya dan dapat diakses melalui media online setiap waktu (dapat dilihat dalam data terlampir).

III.1.5. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target kinerja yang ingin dicapai dan realisasi kinerja dari sasaran 1 diatas disajikan dalam tabel III.3

**Tabel III.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
Meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan
Provinsi Sumatera Barat**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Rangking 15 Nasional	Rangking 11 Nasional	136,36%	Sangat baik

Indikator kinerja sasaran 1 yaitu Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah tahun 2016 dari segi produktifitas Sumatera Barat mengalami kenaikan dari jumlah ekspos berita di media daerah melalui survey monitoring online Sumatera Barat berada pada peringkat 11 tingkat nasional, realisasi indikator kinerja rangking 11 ini telah meningkat dari target peringkat 15 pada tahun 2016 ini.

Alasan rendahnya penetapan target capaian tahun 2016 (masuk 15 besar nasional) sebagai berikut :

1. Kegiatan OPD dan pimpinan belum tercatat dengan baik, sehingga masih banyak kegiatan pemprov yang tidak terekspose.
2. OPD yang belum menyampaikan laporan kegiatan pemprov yang sesuai kewenangannya untuk publikasi umum.

3. Kegiatan pemberitaan melalui kerjasama media online terkendala faktor anggaran dan regulasi lainnya.
4. Belum terbentuknya tim yang solid dalam mendorong produktivitas pemberitaan dalam menjaga stabilitas informasi penyelenggaraan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

III.1.6. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Dibandingkan tahun 2015 dari segi produktifitas isu, posisi Sumatera Barat mengalami peningkatan baik dari segi jumlah ekpos berita maupun peringkat secara nasional, dimana pada tahun 2016 meningkat pada posisi ke-11 dari peringkat ke -13 nasional yang diperoleh pada tahun 2015. Perbandingan tingkat Capaian kinerja indikator kinerja produktifitas penyebaran informasi Pemerintah Daerah Tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.4. Hasil Pengukuran pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2014 – 2016

N o.	Indikator Kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Produktifitas Penyebarluasa n Informasi Pemerintah Daerah	-	-	-		Rangking 13 Nasional	-	Rangking 15 Nasional	Rangking 11 Nasional	118,18%

Karena tidak adanya target indikator kinerja tahun lalu maka dari tabel diatas tidak dapat dilihat capaian kinerja sasaran tahun 2014,dan tidak ada pembandingantara tahun 2016 dengan tahun sebelumnya,hal ini disebabkan perbedaan penetapan indikator kinerja dan target indikator kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya, Pemberian peringkat dari Intelligent Media Management (IMM)baru dilakukan tahun 2016 terhadap ekpos pemberitaan kegiatan pemprov sumbar tahun 2015 dan 2016. Disamping itu alasan belum adanya target dan penilaian pemeringkatan terhadap produktifitas penyebaran informasi pemerintah daerah Sumatera Barattahun 2014 dan 2015 sebagai berikut :

1. Belum terjalinnya kerjasama dengan lembaga eksternal; Intelligent Media Management (IMM)yaitu suatu lembagasurvey monitoring media massa yang menggunakan aplikasi teknologi informasi yang dapat menilai, mengelompokkan

dan menghitung jumlah pemberitaan tentang Sumatera Barat untuk online yang merilis ekspos berita kegiatan Pemprov Sumbar.

2. Sehingga indikator sasaran strategis dan pengukuran target capaian kinerja Renstra Biro Humas tahun 2010-2015 lebih mengarah pada output kegiatan belum mengarah sasaran yaitu meningkatkan kepercayaan publik.

III.1.7. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi capaian kinerja dengan target akhir renstra Biro Humas dapat dilihat pada tabel III.5.

Tabel III.5. Perbandingan pencapaian Kinerja dengan target akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2016 terhadap 2021
1	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Rangking 11 Nasional	Rangking 3 Nasional	100 %

Peringkat Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Sumatera Barat tahun 2016 berada pada rangking 11 dan realisasi tahun sebelumnya/ tahun 2015 peringkat ke 13 atau dengan capaian 118,18 %. Target akhir Renstra diharapkan tercapainya target rangking 3 Nasional atau 100 %

III.1.8. Analisis keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah dengan memperoleh penilaian peringkat 11 ditingkat Nasional adalah karna berbagai upaya peningkatan yang telah dilakukan dalam penyebarluasan informasi di 3 kanal informasi utama (media cetak, elektronik, dan media luar ruang) kemudian menyebarkan sebanyak mungkin informasi baik terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan menjaga tatanan informasi secara cepat, akurat, proposional, menarik, sehat dan berimbang dan serta selaras dengan dinamika publik. Sehingga sasaran strategis Biro Humas dalam meningkatkan tatanan pemberitaan yang ,sehat ,adil dan berimbang, pelayanan Biro Humas kepada Kepala Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam

menciptakan persepsi publik akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dalam setiap kebijakan pembangunan yang hendak ditempuh.

1. Kegiatan Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan sbb:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah	80%	85,66%	107,08%

Salah satu materi informasi utama utama yang disebarluaskan ke publik adalah program kerja dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam hal ini liputan kegiatan Kepala dan wakil kepala Daerah. Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan liputan kegiatan pemerintah daerah dengan rumus penghitungan persentase sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan kepala daerah yang diliput}}{\text{Jumlah total kegiatan kepala daerah}} \times 100\%$$

$$\% \text{ liputan Pemerintah Daerah} = \frac{729}{851} \times 100 \% = 85,66 \%$$

Pada tahun anggaran 2016, ditargetkan 80% dari total keseluruhan kegiatan kepala daerah dapat terliput. Dalam pelaksanaannya, target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi -bahkan dilewati- Dengan demikian, capaian indikator kinerja liputan kegiatan pemerintah daerah terukur sebesar **107,08 %**.

Tabel III.6. Perbandingan jumlah liputan kegiatan tahun 2016 dan tahun 2015.

KEPALA DAERAH	JUMLAH KEGIATAN 2015	KEGIATAN DILIPUT 2015	JUMLAH KEGIATAN 2016	KEGIATAN DILIPUT 2016
Gubernur	578	590	398	347
Wakil Gubernur	282	295	301	277
Sekretaris Daerah	78	112	97	72
Para Asisten	-	-	55	33
Total	938	997	851	729

2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui media cetak, media ruang dan media elektronik (gabung 3 kegiatan)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase publikasi media cetak	40%	94,11%	235,275%
3	Persentase publikasi media luar ruang	40%	2,94%	7,35%
4	Persentase publikasi media elektronik	40%	14,70%	35%
	Rata-rata capaian			92,54 %

Materi-materi informasi yang telah dikumpulkan, mencakup kegiatan kepala daerah, informasi penyelenggaraan pemerintahan, dan tanggapan/respon pemerintah atas isu yang berkembang di masyarakat selanjutnya diolah untuk kemudian disebarluaskan ke publik melalui tiga kanal utama; media cetak (koran dan portal online), media elektronik (TV dan radio), dan media luar ruang (spanduk, baliho, dan poster).

Capaian kinerja dari masing-masing kanal informasi publik di atas dihitung dengan jumlah urusan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dipublikasikan dari total 34 urusan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU tersebut, dengan target masing-masing kanal; media cetak (40 % dari seluruh urusan pemerintah), media elektronik (40% dari seluruh urusan pemerintah), dan media luar ruang (40% dari seluruh urusan pemerintah). Formula penghitungan realisasi kinerja, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan berdasarkan UU 23/2014}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Publikasi media cetak,} = \frac{32}{34} \times 100 \% = 94,11 \%$$

$$\% \text{ Capaian kinerja} =$$

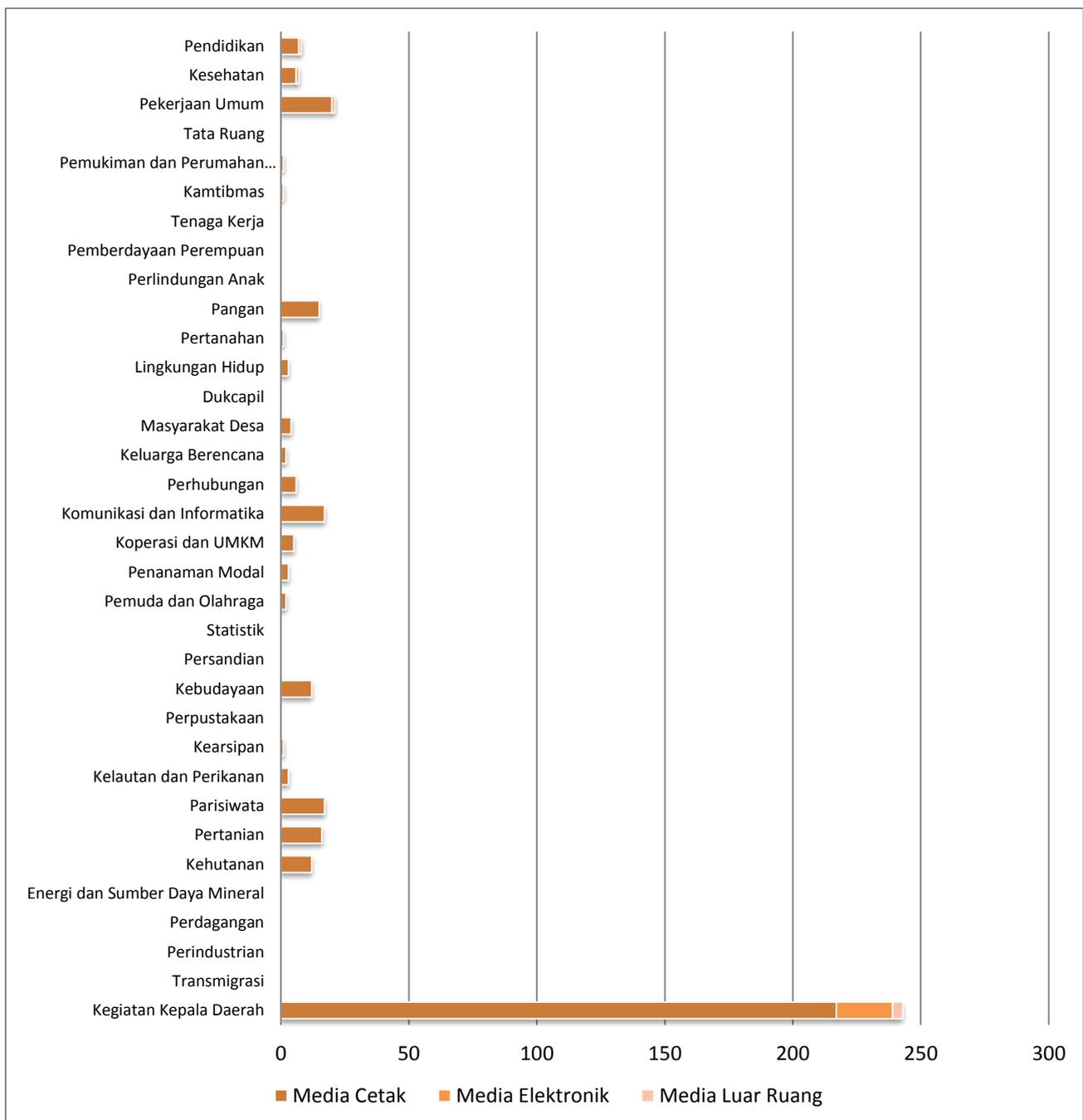
$$\frac{\text{Realisasi \% publikasi Media Cetak } (94,11)}{\text{Target } (40)} \times 100 = 235,275 \%$$

Dalam pelaksanaan kegiatan, Biro Humas telah mempublikasikan informasi menyangkut 32 urusan pemerintahan melalui 421 materi pemberitaan di media cetak, dari 34 urusan pemerintahan berdasarkan UU 23/2014.

Media elektronik, selama tahun 2016 dipublikasikan 5 urusan pemerintahan melalui 24 materi informasi, yang berarti telah merealisasikan kerja sebesar 14,70%. Dengan realisasi ini, maka capaian indikator kinerja publikasi di media cetak adalah 80,75%.

Untuk media luar ruang,: 1 urusan pemerintahan dipublikasikan melalui 3 jenis media luar ruang; baliho, spanduk, dan poster. Dengan formula yang sama, **capaian kinerja publikasi media luar ruang adalah sebesar 7,35 %** dimana realisasi kerja sebesar **2,94%** dari 40% target yang ditetapkan.

Grafik III.2. Sebaran publikasi berdasarkan media dan topik



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa formula yang telah ditetapkan untuk menghitung realisasi kinerja penyebarluasan informasi di 3 kanal informasi utama (cetak, elektronik, dan media luar ruang) terlalu menitikberatkan pada urusan pemerintahan yang diliput tanpa memperhitungkan jumlah publikasi untuk masing-masing urusan pemerintahan. Hal ini menyebabkan pengukuran tidak begitu relevan dengan sasaran peningkatan penyebarluasan informasi karena tidak mampu memperlihatkan jumlah peningkatan penyebarluasan informasi itu sendiri. Formula di atas juga menyebabkan efektifitas penggunaan anggaran serta pengaruh jumlah anggaran terhadap tinggi atau rendahnya penyebarluasan informasi menjadi tidak terlihat.

Hal ini akan dijadikan pertimbangan dalam perumusan formula hitung realisasi dan capaian kinerja dalam perencanaan kegiatan-kegiatan Biro Humas di tahun anggaran mendatang.

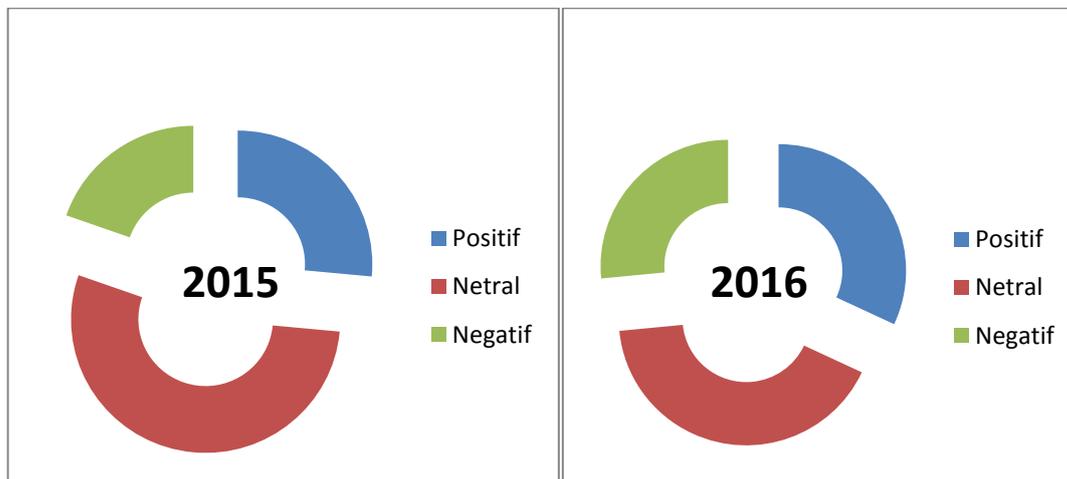
3. Kegiatan Pengkajian Analisa Pemberitaan

Indikator Kinerja ini adalah mengukur 'ratio pemberitaan' dimaksudkan untuk memantau konten media terkait kinerja dan kebijakan pemerintah agar didapat gambaran citra pemerintah dalam potret media massa. Hasil dari monev diharapkan dapat dijadikan pertimbangan, pembelajaran, masukan, dan penghimpunan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan perumusan kebijakan. Biro Humas, sejalan dengan tupoksinya, bertugas untuk memastikan dan menjaga pemberitaan terkait pemerintah provinsi agar tetap stabil dan berada di ratio 40:40:20 antara konten berita yang bernilai positif, Netral dan konten berita bernilai negatif. Ratio perbandingan yang sama juga dijadikan sebagai target pencapaian indikator kinerja ratio berita pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan pengkajian analisa informasi untuk mengetahui ratio pemberitaan dilakukan dengan memantau segala artikel/opini/komentar/liputan yang terkait dengan penyelenggara atau penyelenggaraan pemerintahan di 7 media cetak lokal Sumbar setiap hari. Sepanjang tahun 2015 lalu, dari 1817 berita terkait pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat, didapati 481 berita bernilai positif, berita bernilai netral 979 dan 357 berita bernilai negatif. Dengan jumlah ini,

didapati ratio pemberitaan pembangunan sebesar **26,47 : 53,88 : 19,64**. Jumlah pemberitaan positif besar ini cenderung berujung pada persepsi dan dugaan negatif publik; dianggap sebagai pencitraan yang berlebihan, pemberitaan yang tidak berimbang, atau pemerintahan yang tidak terbuka terhadap kritik publik. Pada tahun 2016, dari total 30.872 berita terkait Provinsi Sumbar, 9.864 berita bernilai positif dan Netral 12.819. Sedangkan 8.189 berita bernilai negatif. Dengan perbandingan ini, ratio pemberitaan di media massa berada sangat dekat dengan titik ideal yang telah ditetapkan yakni 32 : 41 : 37 yang berarti porsi pemberitaan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah relatif berimbang dan sehat.

Grafik III.4. Perbandingan ratio pemberitaan 2015-2016



Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diatas dan realisasi nya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel III.7 Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan : Untuk Mencapai Peringkat Produktifitas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Ratio Pemberitaan	40:40:20	32,41,27	105,83%

Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja program/kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 'Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi

Sumatera Barat adalah sebesar **98,11%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk dalam kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

4. **Kegiatan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)**

Indikator kinerja dan target capaian kegiatan Koordinasi Kehumasan sbb:

Tabel III.8 Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N
4	Terselenggaranya pembinaan koordinasi kehumasan,tersedianya bahan informasi kehumasan	2 x, 200 buku	2 x 200 buku	100 %
RATA-RATA CAPAIAN				98,11%

Pertemuan Bakohumas merupakan kegiatan koordinasi kehumasan daerah dalam menghimpun aspirasi yang berkembang serta mencari solusi yang tepat dalam menjalankan kegiatan kehumasan daerah baik yang ada di SKPD, Instansi, Lembaga Pemerintah, BUMD/BUMN dan Humas Pemkab/Pemko se-Sumatera Barat.

Selama tahun 2016, pertemuan Bakohumas telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 19 September 2016 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat dimana Gubernur Sumatera barat dan Yufrimal Dani (Kepala Perwakilan PT Ebdesk Indonesia Wilayah Sumbar) bertindak sebagai narasumber dengan pokok bahasan; "*Monitoring Isu Publik Menggunakan Aplikasi Elektronik.*" Dan Siri Antoni narasumber (Asmen Komersil dan Pengembangan Bisnis Perum LKBN Antara) Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta.

Kegiatan kedua dilakukan pada tanggal 23 Desember 2016 di Ruang rapat Istana Gubernur dimana Wakil Gubernur dan Hempi Nartomo Prajudi (Antara), Kahirul Jasmi(Pimpred Singgalang) bertindak sebagai narasumber dengan pokok bahasan; "*Upaya Peningkatan Kinerja Humas*" ."Kegiatan Bakohumas kali kedua ini juga diikuti oleh 70 peserta.

Output kegiatan Bakohumas lainnya berupa penerbitan 200 bulletin kehumasan yang disebar ke SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, buletin

Bakomas menyajikan berita kegiatan yang bersifat kehumasan dan yang kegiatan yang menunjang kehumasan.

Perubahan paradigma dan kebiasaan; menciptakan sumber daya manusia lokal yang handal dalam pengembangan *open source software*; menciptakan sumber daya manusia lokal yang handal dalam penggunaan aplikasi berbasis *open source*. Realisasi capaian kinerja kegiatan ini 100 % sesuai target kinerja.

III.1.9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja peningkatan produktifitas penyebarluasan informasi pemerintah provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan kerjasama dengan intelligent Media Management (IMM). Biro Humas melaksanakannya melalui program **Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dengan 8 kegiatan dengan uraian tabel III.9 berikut ini :

Tabel III.9. Realisasi Penggunaan Sumber daya Indikator kinerja Sasaran I

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Rangking 15 besar Nasional	I. Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	2.271.006.000	2.169.911.125	95,44
			1. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah	750.000.000	740.661.550	98,78
			2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	748.339.000	739.698.500	98,85
			3. Penyebarluasan Informasi melalui Elektronik	360.851.000	304.739.125	84,45
			4. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan	86.336.000	82.550.700	95,62
			5. Pembuatan Film Dokumentasi Potensi	35.000.000	33.741.000	96,40
			6. Penyebarluasan Informasi melalui media ruang	272.480.000	268.520.250	98,55
			7. Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	70.961.000	70.488.500	99,33

		II. Program Informasi dan Komunikasi Publik	393.533.000	368.242.111	91,21
		7. Pengkajian Analisis Pemberitaan	122.701.000	103.831.211	84,62
		8. Koordinasi Kehumasan	270.832.000	264.410.900	97,79

Sesuai Tabel diatas yang mendukung Sasaran I yaitu Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ada 2 Program 1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaran Pemerintah daerah dengan jumlah Anggaran sebesar **Rp.2.271.006.000** terlealisisebesar Rp.**2.169.911.125**atausebesar**95,44%**danProgram Informasi dan Komunikasi Publik

Dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.393.533.000** terealisasi sebesar Rp.**368.242.111** atau sebesar **91,21 %**

Dari Pencapaian sasaran I ini diharapkanMeningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Sehingga sasaran strategis Biro Humas dalam meraihpersepsi publik yang baik terhadap kepala daerah dan pemerintahan akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan bagi setiap kebijakan pembangunan yang hendak ditempuh. Wujud dukungan publik ini akan berdampak pada meningkatkan Tata pemerintahan yang baik menuju masyarakat sumatera Barat yang madani dan sejahtera sesuai visi Gubernur Sumatera Barat.

Tabel III.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kineja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	118,18%	90,73 %	130,25 %

Dari tabel diatas realisasi program dan kegiatan untuk mendukung sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tergolong baik

dengan tingkat efisiensi 130,25 % dimana persentase penyerapan anggaran (90,73) lebih rendah dari persentase capaian kinerja 118,18%. Dari indikator kinerja produktifitasPenyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian Sasaran.

III.2	Sasaran Strategis II	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat
--------------	-----------------------------	--

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 lalu merupakan momentum penting untuk mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. UU yang mewajibkan setiap Badan Publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan sederhana dalam mekanisme ini kemudian menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk menegakkan haknya dalam memperoleh informasi publik.

Untuk memenuhi amanat UU KIP, PJM Pemerintah Provinsi menetapkan peningkatan keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu sasaran strategis dan indikator kinerja provinsi yang harus dicapai lima tahun kedepan yang diukur dengan menggunakan indeks capaian yakni **Indeks Keterbukaan Informasi Publik** tahun 2016 yang mesti dicapai : nilai **55 yang dinilai oleh Lembaga Independen Komisi Informasi Pusat**. Untuk Tahun 2016 hasil dari penilaian Komisi Informasi Pusat bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat mendapat nilai Memperoleh Nilai Indeks 73,05 di Tingkat nasional. dengan kategori "cukup informatif"

III.2.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target kinerja yang ingin dicapai dan realisasi kinerja dari sasaran 2 diatas disajikan dalam tabel III.8

Tabel III.11. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran II Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat	55	73,05	138,82 %	Cukup informatif (CI)

Indikator sasaran II Biro Humas yaitu Indeks keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 berdasarkan penilaian oleh Lembaga Independent Komisi Informasi Publik Pusat. Melalui Surat Keputusan KIP Nomor: KEP/KIP/J.II/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Hasil Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 16 Desember 2016. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016. Dari 10 Provinsi yang dinilai KIP, Sumatera Barat berada pada peringkat 10 besar, dengan nilai 73,05 untuk Keterbukaan Informasi dengan kualifikasi "Cukup Informatif". Peringkat ini patut disyukuri karena dalam RPJM 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat nilai 55 adalah perkiraan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang ingin dicapai tahun 2016 bila dibandingkan antara target dengan penganugerahan nilai oleh KIP maka indeks keterbukaan Informasi Publik lebih baik dari yang diperkirakan yaitu capaian 138,82 %.

III.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Karna tidak adanya indikator kinerja dari tahun lalu, maka dalam tabel ini kinerja tahun 2014 dan kinerja Tahun 2015 tidak dapat dilihat dan dibandingkan antara tahun 2016 dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan tidak ada indikator kinerja "indeks keterbukaan informasi publik" dalam target RPJM provinsi maupun Renstra Biro Humas tahun 2010-2015. Disamping itu tahun 2015 KIP pun belum memberikan penilaian terhadap kinerja Pemrov. Sumbar.

Tabel III.12. Hasil Pengukuran pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 11 Tahun 2014 – 2016

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-	55	73,05	138,82 %

III.2.3. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi capaian kinerja dengan target akhir renstra Biro Humas dapat dilihat pada tabel III.10.

Tabel III.13. Perbandingan pencapaian Kinerja dengan target akhir Renstra indikator kinerja sasaran II

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2016 terhadap 2021
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73,05	80	91,31 %

Nilai Indeks keterbukaan informasi publik 73,05 tahun 2016 dengan capaian 91,31 %.

Target 80 yang ingin dicapai akhir RPJMD dan Renstra Biro Humas 2016-2021, sedangkan indeks tahun 2016 yang diperoleh 73,05% , maka dapat dihitung capaian kinerja 2016 terhadap target mesti diwujudkan tahun 2021, telah tercapai 91,31 % .Peningkatan yang harus diupayakan Pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2017 untuk berada pada peringkat 80 pada target akhir Renstra yang diharapkan tercapainya target ranking 3 Nasional atau 100 %

III.2.4. Analisis keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam hal ini Biro Humas meukan satu unit kerja pada SKPD Sekretariat Daerah yang berkontribusi langsung dalam pencapaian Indeks Keterbukaan Publik tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016.

Untuk mendukung Indikator kinerja Provinsi Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Biro Humas tahun 2016 melaksanakannya dalam 2 Program dengan 6 buah kegiatan sebagai berikut :

I. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan 7 kegiatan:

- 1. Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik*
- 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)*
- 3. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional;*
- 4. Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko*
- 5. Bimtek Pelayanan Informasi Publik*

II. Pengembangan Komunikasi dan Informatika dengan 2 kegiatan :

- 6. Pengelolaan Website Pemprov. Sumbar*
- 7. Lanjutan Pembangunan Gedung Infokom*

Indikator Kinerja masing-masing Kegiatan tersebut diatas dan realisasinya dapat diukur dan tergambar dalam Tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pelayanan permintaan Informasi yang terpenuhi oleh PPID	80%	100%	125%
2	Meningkatnya kualitas kelompok Informasi masyarakat	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya kualitas kelompok tradisional masyarakat	100 %	100 %	100 %
4	Persentase PPID Kab/Kota yang terbentuk dan pengelolaan DIP	80 %	142,42%	178,02%
5	Persentase meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan informasi	100 %	100%	100%
6	Persentase data informasi yang diinput oleh operator SKPD ke dalam website Sumbarprog.go.id	80 %	116,59%	145,73 %
7	Persentase rampungnya gedung Inforkom	100 %	100 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja program kegiatan sebesar 1838,18 % (kategori sangat baik) dengan perolehan Indeks keterbukaan Informasi Publik 73,05 dari Lembaga Independen Komisi Informasi Pusat tahun 2016. Indeks Tahun 2016 lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Provinsi sebesar 22,05 sehingga dalam hal ini Biro Humas termasuk dalam kategori **berhasil**.

Masing-masing indikator kegiatan tersebut diatas lebih diperjelas dalam uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan :Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pelayanan permintaan Informasi yang terpenuhi oleh PPID	80%	100%	125

Penetapan kepuasan pelayanan informasi sebagai indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik adalah salah satu unsur untuk mencapai sasaran strategis "meningkatkan keterbukaan informasi Publik Provinsi Sumatera Barat".

"Pelayanan informasi publik" dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan PPID kepada masyarakat dan siapapun yang

membutuhkan informasi daerah untuk tujuan-tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perentase capaian indikator kinerja ini dapat diukur dengan rumus sbb:

$$\frac{\text{Jumlah permintaan informasi yang terlayani}}{\text{Jumlah total permintaan pelayanan informasi pada PPID}} \times 100 \%$$

Tujuan-tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Presentase capaian indikator kinerja ini dapat diukur dengan membagi jumlah permintaan pelayanan PPID yang dapat terlayani dengan total permintaan pelayanan PPID yang masuk sebagai tolak ukur nilai penuh. Target capaian pelayanan informasi tahun 2016 sebesar 80 % dari seluruh permintaan pelayanan Formula kalkulasi realisasi kepuasan pelayanan informasi :

Dalam tahun 2015, selain pelayanan informasi publik secara langsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan, PPID Prov. Sumbar juga telah membuat website www.ppid.sumbarprov.go.id secara swadaya untuk mengantisipasi permintaan pelayanan informasi secara elektronik.

Pembuatan website PPID membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan pelayanan informasi publik (gambar terlampir) Pada tahun 2015 ada 29 permintaan yang masuk dan telah terlayani. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan pelayanan informasi publik melalui Website sebanyak 59 yang terdiri dari 54 permintaan melalui website dan 5 permintaan langsung.

Dari 59 permintaan pelayanan informasi yang masuk tahun 2016 tersebut telah terlayani seluruhnya, artinya realisasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik sebesar 100 % dengan demikian indikator kinerja kegiatan yakni tingkat kepuasan pelayanan informasi publik sebesar 125 %.

2. **Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas	100%	100%	100

	kelompok Informasi masyarakat			
--	-------------------------------	--	--	--

Indikator kinerja Pemberdayaan KIM yaitu meningkatkan kualitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) target kinerja kegiatan 100 % output kegiatan berupa Bimtek bagi 55 peserta masyarakat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat. Untuk itu, Biro Humas telah menyelenggarakan Bimtek bagi KIM yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2015 di Ruang Rapat Setda Lantai II *EscapeBuilding* Kantor Gubernur Sumatera Barat dimana Kepala Biro Humas dan Amin Sar Manihuruk (Kementerian Kominfo) bertindak sebagai narasumber. Tema yang dipilih untuk tahun 2015 yakni, "Melalui KIM, Kita Tingkatkan Semangat Ayo Kerja, Demokrasi, dan Keterbukaan Informasi.". Dari 55 peserta telah mendapat bimbingan seluruhnya atau realisasi kinerja 100 %, dari kegiatan Bimtek informasi diharapkan masyarakat mampu menyikapi keterbukaan informasi, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100 % yang dinilai "sangat baik"

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas kelompok media tradisional	100%	100%	101

Dalam rangka meningkatnya peran profesional dan kesamaan persepsi dalam meningkatkan peran informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan peraturan Kemkominfo No.17/P/M.KOMINFO/03/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah kabupaten/kota. Biro Humas mengadakan Bimbingan teknis Pengembangan dan Pemberdayaan Media Tradisional Kabupaten/Kota se Sumbar. Untuk menindaklanjuti hal ini, Biro Humas melakukan *monitoring* sekaligus menginventarisasi group media tradisional yang ada di Kab/Kota sehingga didapatkan Group-group ini diberikan bimbingan teknis guna penambahan wawasan bagi Pembina

dan Kelompok. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 di Ruang Rapat Setda Kantor Gubernur Sumatera Barat dengan Narasumber dari Kementerian Kominfo RI, Kepala Biro Humas Prov. Sumatera Barat, dan dari Budayawan UPTD Taman Budaya Sumbar. Jumlah peserta yang diundang sebanyak 26 orang. Dalam Bimtek ada instrumen ukur peningkatan pengetahuan/wawasan peserta bimtek dengan mengisi Kuesioner tentang pemahaman, output kegiatan 100%, Output kegiatan 55 peserta menerima bimbingan teknis, capaian kinerja dapat dinilai "cukup baik"

4. Kegiatan : Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PPID Kab/Kota yang terbentuk dan pengelolaan DIP	80%	142,42%	178,02%

Tujuan utama dari kegiatan Diseminasi Informasi ini adalah untuk melakukan Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terhadap pentingnya arti keterbukaan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat terbentuk dan dapat menyusun Daftar Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tujuan ini, realisasi kinerja kegiatan dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mengikuti Diseminasi yang telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)}}{\text{Jumlah total SKPD}} \times 100\%$$

Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2016 di Ruang Rapat Setda Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Barat dan diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekretaris/Kabag/Kabid yang membidangi data Dokumentasi Program di lingkungan Pemprov. Sumbar dengan jumlah 47 orang. dengan jumlah 50 orang.

Dalam evaluasi jumlah PPID SKPD yang telah menyusun DIP sebagaimana materi dan penjelasan yang diberikan dalam Diseminasi Informasi pada akhir tahun 2015, didapati 33 PPID SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun DIP sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP dan menyerahkan pada PPID Utama Provinsi dan tahun 2016 telah terbentuk 47 SKPD Ini berarti terjadi peningkatan jumlah PPID SKPD Provinsi yang telah menyusun DIP pada tahun 2016 dibanding jumlah pada tahun 2015, peningkatan tersebut sebesar 42,42 %.

5. *Kegiatan : Bimtek Pelayanan Informasi Publik*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan informasi	100%	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antar aparatur humas daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, Biro humas menyelenggarakan kegiatan, Bimtek Pelayanan Informasi Publik dimana output kegiatan Bimtek ini adalah memberikan pembekalan dan pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi baik di Provinsi maupun di Kab/Kota tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pelayanan PPID. Realisasi kegiatan Bimtek ini hanya 1 kali dari 2 kali yang direncanakan atau terlaksana sebesar 57,98 % dari anggaran tersedia.

6. Kegiatan : Pengelolaan Website Pemprov. Sumbar

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase data informasi yang diinput oleh operator SKPD ke dalam website Sumbarprog.go.id	80 %	116,59%	145,73 %

Peningkatan data *website* sumbarprov.go.id adalah bentuk respon Biro Humas terhadap perkembangan TI yang menciptakan;

1. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai angka 34,9% dari total populasi pada tahun 2014. (APJII & PusKakom UI, 2014)
2. Publik aktif yang memiliki akses seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi menggunakan internet melalui *gadget-gadget* yang bersifat personal;
3. Pergeseran media *mainstream* dari media cetak ke media *online*;

Peningkatan data *website* diharapkan dapat mengakomodir pengguna-pengguna internet yang membutuhkan arsip-arsip kegiatan atau informasi-informasi terbaru terkait penyelenggara/penyelenggaraan pemerintahan secara cepat, ringkas, dan *real-time*. Atas dasar ini, peningkatan data *website* dijadikan indikator kinerja bagi Sasaran II.

Realisasi kinerja dihitung dengan membagi jumlah total data yang diinput oleh operator website SKPD yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur dalam satu tahun dengan jumlah target data minimal setiap tahunnya. Untuk tahun 2016, ditetapkan jumlah sebanyak 3.300 data dengan rincian; masing-masing operator SKPD diharapkan menginput minimal 9 data informasi ke website Pemprov Sumbar setiap harinya. Target realisasi minimal tahun ini ditetapkan sebesar 80%.

Tabel III.14. Rekapitulasi data *website* sumbarprov.go.id

BULAN	2013	2014	2015	2016
Januari	17	62	177	167
Februari	17	89	147	254
Maret	84	131	237	235
April	115	144	263	279

Mei	175	187	223	275
Juni	196	175	262	250
Juli	173	224	143	209
Agustus	115	191	184	274
September	276	221	186	251
Oktober	274	187	218	266
November	162	155	199	276
Desember	66	223	259	202
Total	1670	1989	2498	2938

Dari rekapitulasi data tahun 2016 diatas, tercatat jumlah data informasi yang diinput ke dalam website sumbarprov.go.id sebanyak 2938 naik dari tahun 2015 sebesar 116,59 % dari jumlah target yang ditetapkan sebesar 80 %. Dengan demikian capaian indikator kinerja peningkatan data informasi website adalah sebesar 15 %.

Untuk Berita Foto tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel III.15. Rekapitulasi berita foto *website* sumbarprov.go.id

BULAN	2015	2016
Januari		6
Februari		19
Maret		7
April		14
Mei		11
Juni	4	13
Juli	4	9
Agustus	-	11
September	14	6
Oktober	-	10
November	14	12
Desember	20	7
Total	75	125

Dari rekapitulasi data tahun 2016 di atas, tercatat jumlah berita foto yang diinput ke dalam *website* sumbarprov.go.id sebanyak 125, terdapat peningkatan dari tahun 2015 sebesar 40 %.

Melihat perbandingan kunjungan ke website Sumbar.go.id dari tahun 2015 terdapat peningkatan ditahun 2016, Publik aktif yang memiliki akses seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi dalam menggunakan internet melalui gadget-gadget yang bersifat personal dengan adanya media cetak dan media online.

Tabel III.16. Rekapitulasi pengunjung *website* sumbarprov.go.id

BULAN	2015	2016
Januari	3.553	2.630
Februari	3.526	3.622
Maret	3.911	4.682
April	3.995	4.550
Mei	4.995	4.484
Juni	4.220	3.702
Juli	1.308	3.380
Agustus	2.061	5.394
September	2.299	5.552
Oktober	1.692	5.791
November	1.950	5.503
Desember	2.033	4.816
Total	35.583	54.106

Dari rekapitulasi data tahun 2016 diatas, tercatat jumlah kunjungan tahun 2016 54.106 pengunjung di website sumbarprov.go.id ada peningkatan di tahun 2016 sebesar 52 %.

8. Kegiatan: Lanjutan Pembangunan Gedung Infokom

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rampungnya gedung Infokom	100%	100%	100%

Salah satu aset tetap yang pemerintah provinsi yang dikelola oleh Biro Humas adalah gedung Informasi dan Komunikasi. Kondisi fisik gedung

sampai dengan tahun 2015 belum bisa dimanfaatkan sebagai sarana kantor karena pengerjaan pembangunan gedung yang belum rampung dan tidak dianggarkannya dalam APBD semenjak tahun 2011hinggatahun 2015.

Di bentuknya OPD baru berdasarkan UU No.23 tahun 2014 maka di tahun 2016 Pemprov menindaklanjutinya dengan menganggarkan pembangunan Gedung Inforkom yang nantinya disediakan untuk sarana kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya melalui program Pengembangan Komunikasi dan Informatika pembangunan Gedung Inforkom dilanjutkan dengan dukungan dana APBD yang diserahkan pengelolaannya pada Biro Humas tahun 2016 sebesar Rp. 1.891.000.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.697.621.950,- atau sebesar 89,77 %. Secara fisik pekerjaan pembangunan gedung telah selesai selesai 100 % dan telah dimanfaatkan oleh dinas Kominfo provinsi Sumatera Barat.

III.2.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang mendukung Sasaran II Meningkatnya keterbukaan informasi publik Provinsi Sumatera Barat dicapai dengan adanya beberapa faktor sumber daya yang berperan penting yaitu Program dan kegiatan dan pendanaan. Indek keterbukaan informasi publik yang ingin dicapai didukung oleh 2 program :

- 1). Program Informasi dan Komunikasi Publik dan
 - 2). Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika,
- dengan uraiantabel III.9 berikut ini :

Tabel III.17. Realisasi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Sasara II

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALSASI	(%)
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	55	II. Informasi dan Komunikasi Publik	848.895.000	682.316.740	80,38
			1. Pengelola Pelayanan Informasi Publik	190.873.000	101.476.225	53,16
			2. Pemberdayaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM)	45.871.000	34.773.286	75,81
			3. Pemberdayaan Kelompok	146.068.000	114.621.305	78,47

		Media Tradisional			
		B. Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2.191.000.000	1.989.119.550	90,79
		4. Pengelolaan Website Pemprov. Sumbar	300.000.000	300.000.000	
		5. Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	1.891.000.000	1.697.950	88,77

Sesuai Tabel diatas yang mendukung Sasaran II yaitu Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ada 2 Program dengan anggaran dan telah direalisasikan beserta tingkat efisiensi penggunaan anggaran kedua program tsb. sbb:

I. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan jumlah Anggaran sebesar **Rp.848.895.000** terlealisasi sebesar

Rp. **682.316.740** atau sebesar **80,38%** dan

II. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika.

Dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.2.191.000.000** terealisasi sebesar Rp. **1.989.119.550** atau sebesar **90,79 %**

Efisiensi penggunaan sumber daya digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	138,82 %	87,88 %	157,96 %

Dari tabel diatas realisasi program dan kegiatan untuk mendukung sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat tergolong baik dengan tingkat efisiensi 157,96 % dimana persentase penyerapan anggaran (87,88%) lebih rendah dari persentase capaian kinerja 138,82%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari indikator kinerja Biro Humas dalam Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat menunjukkan *adanya efisiensi penggunaan sumber daya* dalam upaya pencapaian Sasaran strategis.

III.3	Sasaran Strategis III	Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat
--------------	------------------------------	---

Pemanfaatan teknologi yang diwujudkan dalam program/kegiatan pengelolaan *e-Government* Pemerintah Daerah Sumatera Barat demi meningkatkan kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat, meningkatkan transparansi pemerintahan, serta efisiensi waktu dan sumber daya dimulai dengan sejumlah langkah yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek; *Penyiapan infrastruktur pendukung implementasi e-Government*; *Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang TI*; dan *Penyiapan aplikasi-aplikasi penunjang e-Government*.

Indikator Kinerja strategis III ini merupakan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang mesti dicapai dalam 5 tahun kedepan dimana target indikator Kinerja Provinsi yakni : Indeks E-Government Provinsi Sumatera Barat yang mesti dicapai tahun 2016 adalah 2,2 yang dalam hal ini Biro Humas sebagai salah satu SKPD yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program dan kegiatan terhadap pemenuhan target pencapaian Indikator Kinerja provinsi tersebut.

Indikator Kinerja Utama untuk Mencapai sasaran Strategis 3 dalam tabel berikut ini :

III.3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja Utama , target dan realisasi untuk Mencapai sasaran Strategis 3 disajikan dalam Tabel III.11 berikut ini :

Tabel III.19. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks E Government Provinsi Sumatera Barat	2,2	-	Belum Dinilai oleh Pusat

Salah satu indikator kinerja utama Biro Humas adalah indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat yang mesti dicapai tahun 2016 adalah 2,2. Target nilai indeks ini terkait langsung dengan penetapan IKU sasaran Misi 2 dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Untuk bisa merealisasikan target IKU tersebut Biro Humas salah satu unit kerja/SKPD yang disertai beban tanggung jawab guna mewujudkan

terselenggaranya e-Government di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, yang mana pada tahun 2016 Biro Humas melaksanakan melalui Program "Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat". Program ini masih merupakan bagian dari Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika lainnya yang diselenggarakan oleh Biro Humas karena saat penyusunan program dalam masa transisi dari Permendagri 13 Tahun 2016 ke penerapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait pelaksanaan e-Government ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika menyusun suatu Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) sebagai model untuk menganalisis penerapan e-Government di instansi-instansi pemerintah baik di tingkat Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Lembaga Pemerintah secara nasional.

PeGI memiliki 5 (lima) dimensi penilaian, yakni: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi ini nantinya akan diberikan bobot yang sama dalam penilaian dengan mempertimbangkan arti penting masing-masing dimensi.

Secara umum kategori penilaian terhadap tata kelola e-Government dalam PeGI, sebagai berikut:

1. Nilai 1,0 sampai dengan 1,49 (sangat kurang) Indikator tidak ada sama sekali atau sangat kurang dari segi jumlah dan kualitas
2. Nilai 1,5 sampai dengan 2,49 (kurang) Indikator sudah ada namun masih perlu ditambah dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas
3. Nilai 2,5 sampai dengan 3,49 (baik) Indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan e-Government namun masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi e-Government pada masa yang akan datang
4. Nilai 3,5 sampai dengan 4,0 (sangat baik) Indikator baik dari segi jumlah maupun kualitas sangat baik. Dampak pada penerapan e-Government terlihat sangat nyata. Kesiapan untuk terus dikembangkan pada masa yang akan datang sudah terlihat jelas.

Penilaian terhadap tata kelola e-Government dalam PeGI tingkat Provinsi terhadap indikator Kinerja utama sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan sekaligus Biro Humas salah satu penanggung jawab terselenggaranya e-Government Pemerintah Provinsi untuk tahun 2015, KemenKominfo Pusat memberikan penilaian rata-rata kepada Pemprov Sumbar 2,01 dengan kriteria kategori "kurang".

Dari penilaian PeGI tersebut berdasarkan 5 dimensi penilaian pelaksanaan e-Government Pemprov Sumatera Barat sbb:

No.	Provinsi	DIMENDI					Nilai Rata-Rata	Kategori
		Kebijakan	Kelembagaan	Infrastruktur	Aplikasi	Perencanaan		
15	Sumatera Barat	2,07	1,93	2,13	2,13	1,80	2,01	kurang

Data lebih lengkap dapat dilihat dapat daftar lampiran buku ini.

Tahun 2016 Kemenkominfo belum memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

III.3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Capaian indikator indek e-Government jika dibandingkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel III.12 berikut ini:

Tabel III.20. Hasil Pengukuran pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1I Tahun 2014 – 2016

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	2,01	-	2,2	-	-

Karna tidak adanya indikator kinerja dari tahun lalu, maka dari tabel diatas tidak dapat dilihat nilai Capaian Indikator sasaran Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat dan tidak adapembandingan dengan capaian kinerja

tahun-tahun sebelumnya. Penyebab adalah karena target tahun 2010-2015 Pemprov belum menetapkan nilai "Indeks" sebagai tolok ukur kinerja untuk menggambarkan sejauhmana implementasi e-Government pada Pemprov. Walaupun demikian tahun 2015 dari data PeGI Sumatera Barat memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan e-Gov pemprov. Sumbar (data terlampir)

III.3.3. Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan Realisasi capaian kinerja dengan target akhir Renstra Biro Humas dapat dilihat pada tabel III.10.

Tabel III.21. Perbandingan pencapaian Kinerja dengan target akhir Renstra indikator kinerja sasaran III Biro Humas

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2016 terhadap 2021
1	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	-	3	-

Sampai dengan saat laporan ini disusun e-Government tahun 2016 Pemprov Sumbar dan Biro Humas belum menerima penilaian Kemenkominfo pusat terkait penyelenggaraan e-Gov di Sumatera Barat,

Tahun 2016 adalah masa transisi ke pelaksanaan UU.23 tahun 2016 dan PP 18 Tahun 2016 maka Program "Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat". masih merupakan bagian dari Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika lainnya yang diselenggarakan oleh Biro Humas, karena perencanaan dan pembahasan Rencana Program dan anggaran 2016 disusun dan dibahas di tahun 2015 dengan acuan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagai dasar penyusunan program per basis urusan. Namun dengan telah dilaksanaannya UU 23 tahun 2014 dan PP No18 Tahun 2016, maka tahun 2017 hingga akhir Renstra 2021 urusan Kominfo khususnya Program Pengelolaan e-Government bukan lagi menjadi bagian dari urusan dan kewenangan Biro Humas. Dengan demikian penetapan indikator indeks e-Government Pemprov pada Renstra Biro Humas dan pada IKU RPJMD perlu direvisi.

III.3.4. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kontribusi Biro Humas dalam memenuhi target indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah direalisasikan melalui program **Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah** dengan 3 kegiatan yaitu :

1. Implementasi e- Government Pemprov.Sumbar
2. Koordinasi Pembinaan Implementasi e – Government Kab/Kota
3. Implementasi Mobile Community Acces Point (M-CAP)

Capaian kinerja 3 kegiatan ini dapat dihitung melalui indikator kinerja masing masing nya. Sepeti tabel III.21.1 berikut ini:

Tabel III.21.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program Kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SKPD yang telah memanfaatkan Aplikasi teknologi Informasi E-Government	80%	39,70%	49,62%
2	Persentase Jumlah aplikasi e-Government tersedia	100%	113,33%	113,33%
3	Persentase pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat kabupaten/kota	80	75,48 %	94,35 %
4	Persentase Pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat di kabupaten/kota	100 %	180 %	180%
RATA-RATA CAPAIAN				109,32

Formula kalkulasi realisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan internal pemerintah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aplikasi e-Government yang telah digunakan}}{\text{Jumlah total aplikasi yang telah diselesaikan}} \times 100\%$$

Dalam rangka pencapaian target IKU Provinsi Biro Humas menyusun kegiatan lebih mengarahkan kepada aspek membangun terlebih dahulu Infrastruktur pendukung implementasi *e-Government ini*. Hal ini bukan tanpa alasan, idealnya memang seharusnya mulai dari tahap perencanaan, /adanya dokumen grand design, regulasi untuk memayungi penerapan sebuah sistem yang terintegrasi nantinya (membangun mulai dari hulu) akan tetapi apabila kenyataanya Biro Humas lebih memilih membangun tahap yang hampir ke hilirnya adalah pilihan yang telah

mempertimbangan berbagai faktor seperti kedaerahan, adat, sumber daya alam, keuangan daerah dan sumber daya manusianya serta kesiapandengan melihat type masyarakat di Sumatera Barat dengan pola penerimaan setiap individunya dan faktor lain sebagainya. Jadi dengan membangun infrastruktur unsur pendukung (implementasi) terlebih dahulu adalah satu lompatan guna terwujudnya percepatan menuju e-government itu sendiri di Sumatera Barat.

Infrastruktur yang telah dibangun Biro Humas sampai saat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni; pengolah data (*server, PC*), komunikasi data (*jaringan*), dan penunjang (*scanner, laptop, handphone*).

Dalam konteks penerapan *e-Government* Sumbar pada tahun anggaran 2015, ketiga jenis infrastruktur pendukung ini telah dilakukan pengadaannya dimulai sejak awal hingga akhir semester II tahun 2015. Tahun 2016 Biro Humas telah membangun aplikasi Aplikasi e-Government yang menjadi salah satu unsur penting dalam pencapaian target indeks e-Government pemerintah Provinsi Sumatera Barat, jumlah aplikasi yang telah dibangun menjadi 68 aplikasi seperti website, portal, simaya dan berbagai aplikasi-aplikasi lainnya.

1. Persentase SKPD yang telah memanfaatkan Aplikasi

Tahun Anggaran 2016 Biro Humas menargetkan pengerjaan aplikasi e-Government 60, realisasi jumlah aplikasi e-Government buatan konsultan TI yang telah selesai dibangun sebanyak 68 aplikasi. Dari jumlah tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 27 aplikasi dan sebanyak 41 aplikasi belum dimanfaatkan dan terdapat beberapa aplikasi dalam proses pengerjaan hal ini karena keterbatasan dan kendala pada SKPD dalam penerapan aplikasi e-Government.

$$\text{Realisasi} = \frac{27 \text{ (dimanfaatkan)}}{68 \text{ (aplikasi dibangun)}} \times 100 \% = 39,70\%$$

2. Persentase jumlah aplikasi e Government yang tersedia

Dari target pengerjaan 60 aplikasi e-Government Tahun 2016, (100%) telah selesai dibangun 68 aplikasi. Diperoleh peningkatan 8 aplikasi dari target yang ditetapkan atau sebesar 113,33 %. hal ini merupakan keberhasilan Biro Humas dalam membangun percepatan penerapan menuju E-Government pemerintah provinsi. Aplikasi e-Government ini salah

satu unsur penting dalam pencapaian target indeks e-Government pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Hingga akhir tahun anggaran 2016, Konsultan TI telah menyelesaikan 68 aplikasi, dan telah dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Website DPRD;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan/SISFOHARSIK pada Inspektrot;
3. Report LPSE, E-Jurnal Pemabgunan Nagari di Bappeda;
4. Website pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana)
5. Website Kominfo di Dishubkominfo
6. Website dan Sistem Informasi Sumberdaya Air di Dinas Pengelola Sumber daya Air
7. Website di Prasjatakim
8. Website Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Sumbar
9. Website di RSJ Prof.DR.HB.Saanin Padang
- 10.Pengembangan Website di RSUD Solok
- 11.Pengembangan Aplikasi JDH di Biro Hukum
- 12.Aplikasi Penomoran Surat, Pengembangan Aplikasi Pengarsipan Surat, Aplikasi Sipintas, Aplikasi CCTV di Biro Umum
- 13.PPID , Pengembangan Portale-Goverment di Biro Humas
- 14.SiMaya di seluruh SKPD

Aplikasi di atas telah dimanfaatkan 2016. Jika diukur dengan formula hitung realisasi, maka realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan 'Persentase pemanfaatan teknologi informasi e-Government' adalah sebesar 39,70 %. Dengan target indikator kinerja sebesar 80%, maka capaian indikator kinerja terukur sebesar 49,62 %.

3. Persentase pemahaman SKPD kab/kota dalam memanfaatkan Aplikasi teknologi e-Government

Unsur lain yang tidak kalah penting berkontribusi mencapai nilai indeks e-Government Pemprov.yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan dan implementasi *e-Government* di Sumbar, aparatur Biro Humas telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan

mengikuti sejumlah bimbingan teknis dan pelatihan. Bimtek/pelatihan yang telah dilaksanakan/diikuti, antara lain:

1. Sosialisasi e-Government ; 19 Kab/kota dan 49 SKPD Pemprov;
2. Bimtek admin/User (Pimpinan)dengan SmartPhonepeserta 49 orang

Tercapainya sasaran ini dinilai dengan peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diulas di masing-masing kegiatan untuk kemudian diterapkan di lingkungan kerja atau lingkungan sosial masing-masing.Target yang hendak dicapai adalah peningkatan pemahaman 80% peserta yang mengikuti masing-masing kegiatan. Formula penilaian dapat dilihat dari rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah peserta yang memahami materi yang diulas}}{\text{Jumlah total peserta yang mengikuti bimtek/pelatihan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data rekapitulasi dan hasil penghitungan terhadap peningkatan jumlah peserta pelatihan yang memahami materi pelatihan, maka **realisasi indikator kinerja adalah sebesar 75,48%**. Dengan demikian, capaian indikator kinerja pelatihan implementasi SiMAYA adalah sebesar **85,78 %**.

4. Persentase Pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat di kabupaten/kota

(Kegiatan Implementasi Mobile Community Access Point (M-CAP)

Dalam rangka merealisasikan kegiatan Implementasi *Mobile Community Access Point* (M-CAP) di dua puluh Nagari di yang tersebar di 18 Kab/Kota se-Sumatera Barat, telah dilaksanakan koordinasi dengan 8 Kab/Kota (Kab. Dharmasraya, Solok Selatan, Tanah Datar, 50 Kota, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, dan Kota Pariaman). Koordinasi ini dilakukan ke masing-masing Kabupaten/Kota agar dapat membantu/memfasilitasi kegiatan ini di daerah.

Dalam pelaksanaannya, jumlah Nagari yang dikunjungi dan difasilitasi agar dapat terhubung dengan jaringan internet melebihi target yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 32 Nagari.dari 40 nagari yang

ditargetkan. Tingkat pencapaian kunjungan yang melebihi target ini disebabkan oleh upaya penghematan yang dilakukan dengan mengurangi anggota tim pada setiap kunjungan ke Nagari.

Untuk menghitung realisasi capaian data kunjungan

Jumlah Laporan data kunjungan ke nagari kab/kota (72)

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{X} \times 100 \% = 180\%}{\text{Taget Naragi yang akan dikunjungi}} \quad (40)$$

III.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator kinerja Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat yang mendukung Sasaran III(tiga) Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat dicapai dengan adanya beberapa faktor sumber daya yang berperan penting yaitu Program dan kegiatan dan pendanaan. Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat yang ingin dicapai didukung oleh 1 program : **1**), *Program Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah, dengan uraian tabel III.11.2 berikut ini :*

Tabel III.22. Realisasi penggunaan sumber daya indikator kinerja sasaran III

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALSASI	(%)
3	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat	2,2	Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah	2.463.159.000	1.140.743.520	49,72
			1. Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Kota	62.873.000	58.763.115	93,46
			2. Implementasi e-Government Pemprov Sumbar	2.330.434.000	1.013.366.280	43,48
			3. Implementasi Mobile Community Access Point (M-CAP)	69.852.016	68.614.125	98,23

Sesuai Tabel diatas yang mendukung Sasaran III yaitu Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi

Sumatera Barat dilaksanakan melalui1 Program Pengelolaan e- Government Pemerintah Daerah dengan alokasi APBD tahun 2016 untuk program ini sebesar **Rp.2.463.159.000**, terlealisasikan hingga 31 desember 2016 sebesar **Rp.1.140.743.520** atau sebesar **(43,48 %)** Realisasi anggaran dibawah 80% adalah kegiatan Implementasi e- Government Pemprov Sumbar yang indikator kinerjanya adalah Persentase SKPD yang telah memanfaatkan Aplikasi teknologi Informasi E-Goverment realisasinya dibawah target karena beberapa aplikasi yang sedang dalam pengerjaan dan sejumlah aplikasi yang belum dimanfaatkan pengguna.

Efisiensi Penggunaan Sumber daya :

Tabel III.23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat.	- <i>(belum diukur)</i>	49,72 %.	-

Dari tabel diatas realisasi program dan kegiatan untuk mendukung sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatkan nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat jika dilihat per item kegiatan tergolong efisiensi karena serapan anggaran per kegiatan lebih rendah dari persentase capaian kinerja.

Khususnya **kegiatan Implementasi e- Government Pemprov Sumbar** dimana persentase penyerapan anggaran (43,48 %) lebih rendah dari persentase capaian kinerja kegiatan 49,62%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari indikator kinerja Biro Humas Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat. Terdapat *efisiensi penggunaan sumber daya keuangan* dalam upaya pencapaian Sasaran strategis Meningkatkan nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat

III.4. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG/PENGHAMBAT CAPAIAN

III.4.1. FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN

Dengan memperhatikan analisis capaian kinerja yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 2 dari 5 sasaran strategis yang sebelumnya ditetapkan tidak tercapai. Pada dua sasaran strategis tersebut yakni:

Pada sasaran strategis 'Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi publik' diketahui bahwa **sebab rendahnya nilai realisasi indikator kinerja yang berujung pada nilai capaian indikator kinerja yang jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja adalah masih belum termanfaatkannya aplikasi-aplikasi yang telah dirancang oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, belum termanfaatkannya aplikasi juga disebabkan oleh belum sempurnanya aplikasi-aplikasi yang telah dirancang tersebut.**

Dalam pencarian lebih lanjut dan mendalam mengenai pemicu utama yang menyebabkan realisasi kinerja yang tidak memuaskan ini, didapat **faktor utama yang memberi pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung, yakni belum tersedianya dokumen *grand design* dan dasar regulasi yang memayungi pengembangan *e-Government* di Provinsi Sumatera Barat** yang berdampak pada dua hal, yakni:

1. Tidak terarahnya pengembangan aplikasi pendukung *e-Government*;
2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal; percepatan penetrasi TI ke sistem pemerintahan untuk proses administrasi internal yang lebih efisien dan efektif dan pelayanan publik yang cepat dan transparan; memanfaatkan peluang membangun aplikasi sesuai kebutuhan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk memperbaiki hal ini, dalam perencanaan ke depan terkait penerapan *e-Government* di Provinsi Sumatera Barat akan diupayakan penyusunan dokumen *grand design* dan payung hukum penerapan *e-Government* Sumatera Barat dengan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait kondisi dan potensi Sumatera Barat terkait penerapan

e-Government untuk mereduksi kemungkinan perencanaan yang tidak tepat sasaran dan tidak berdampak.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia kehumasan daerah

Pada sasaran strategis 'peningkatan kualitas sumber daya manusia kehumasan daerah' diketahui bahwa **sebab rendahnya nilai realisasi indikator kinerja yang berujung pada nilai capaian indikator kinerja yang jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja adalah tidak adanya instrumen untuk mengukur realisasi indikator kinerja**. Hal ini menyebabkan 6 dari 12 indikator kinerja sasaran strategis tidak dapat diukur dampak pelaksanaannya. 6 indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Koordinasi ;
2. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat;
3. Pembinaan Kelompok Media Tradisional;
4. Koordinasi kehumasan daerah (Bakohumas);
5. Implementasi *Mobile Community Access Point* (M-CAP).

Ini mengakibatkan nilai rata-rata realisasi kerja sasaran tetap rendah walaupun capaian dua indikator kinerja lain mendapatkan nilai yang tergolong baik. Selain itu, belum adanya penilaian dari pusat terhadap penyelenggaraan e-Gov Sumatera Barat juga menyebabkan tidak ternilainya sejumlah kegiatan yang berhasil dicapai Biro Humas dalam tahun anggaran 2016 ini, namun adanya prestasi nasional untuk Pemprov. Sumbar yang cukup mengembirakan

1. Penilaian KIP Pusat terhadap keterbukaan informasi Publik di Sumatera Barat masuk penilaian 10 besar atau nilai (73,05) untuk kategori Pemerintah Provinsi. dengan kategori "Cukup Informatif" (data terlampir)
2. Meningkatnya Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah dinilai oleh lembaga survey nasional IMM diperingkat 11 nasional walaupun belum masuk dalam 10 besar nasional.
3. Jumlah Nagari yang dijangkau oleh M-CAP yang jauh melebihi jumlah Nagari yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Menindaklanjuti hal ini, akan dilakukan penyusunan instrumen pengukuran realisasi kinerja yang berorientasi *Outcome* agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terukur tingkat capaian kerjanya. Diharapkan, adanya instrumen tersebut akan memberi dampak positif terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas di tahun-tahun mendatang.

III.4.2. FAKTOR PENDUKUNG CAPAIAN

Terlepas dari tidak tercapainya target dua sasaran strategis yang digariskan, Biro Humas berhasil memenuhi bahkan melebihi target di 3 sasaran strategisnya yang pencapaian masing-masingnya dapat dikategorikan sebagai **Sangat Baik**, yakni:

1. Meningkatkan penyebaran informasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan sistem informasi manajemen.

Bagaimanapun, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mencapai target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan ditemukan sejumlah hal yang patut menjadi catatan untuk bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan perencanaan sasaran/program/kegiatan Biro Humas di tahun-tahun mendatang, antara lain:

1. Dalam indikator kinerja sasaran 'Meningkatkan penyebaran informasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,' media massa yang digunakan sebagai kanal penyebaran informasi sebagian besarnya -jika enggan dikatakan seluruhnya- merupakan media-media konvensional yang sebagiannya -berdasar pada kajian APJII dan PusKaKom Universitas Indonesia yang diterbitkan pada medio 2015- tidak menyasar beberapa segmen masyarakat dan sebagian lainnya telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkan dan menambahkan beberapa media informasi baru seperti media sosial berbasis internet, jejaring sosial berbasis internet, *website* sumbarprov.go.id, dan portal-portal berita berbasis internet sebagai indikator kinerja sasaran di tahun-tahun mendatang. Sejumlah landasan pikir bagi gagasan ini, sebagai berikut;

- Jumlah pengguna media-media tersebut yang terus meningkat seiring penetrasi TI terutama di bidang komunikasi personal yang menggeser posisi beberapa media massa *mainstream* di kelompok masyarakat urban dan kelompok usia produktif;
 - Pemanfaatan dan penambahan sejumlah media berbasis internet tersebut pada dasarnya juga dapat dianggap sejalan dengan rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kominfo untuk lima tahun ke depan yakni peningkatan pengembangan, pemanfaatan, dan penyusunan regulasi Jaringan Pita Lebar;
 - Media-media berbasis internet bersifat *real-time*. Dengan demikian, pemerintah daerah -dalam hal ini, terutama Biro Humas- dapat menyebarkan informasi secara cepat dengan hambatan yang relatif kecil;
 - Penyebarluasan informasi menggunakan media-media berbasis internet membutuhkan biaya yang relatif tidak besar; dan
 - Berbeda dengan media konvensional, komunikasi melalui media-media berbasis internet cenderung bersifat dua arah. Dengan demikian, ia dapat digunakan sebagai kanal untuk menampung/menanggapi aspirasi publik secara langsung dan lebih cepat. Dalam hipotesa sementara dapat diasumsikan, komunikasi personal yang tanggap dari penyelenggara pemerintahan terhadap masyarakat akan memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
2. Dalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran kepuasan pelayanan publik, diseminasi informasi mengenai UU KIP dan pembentukan PPID, beberapa hal yang menjadi catatan; belum adanya komitmen yang kuat dari pimpinan SKPD dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat; masih rendahnya determinasi dan integritas sebagian besar PPID Pembantu dalam mendokumentasikan, mengelola, dan melakukan pengarsipan atas informasi yang dimilikinya secara tertib dan teratur.

III.5. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2016 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. 9.940.624.000. Hingga 31 Desember 2016, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 81,31% atau sebesar Rp. 8.082.971.204, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.25. Realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.563.970.000	1.526.050.119	97,58
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.960.000	9.956.000	99,96
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	927.700.000	892.474.589	96,20
3	Penyediaan jasa jaminan barang milir daerah	17.000.000	16.007.000	94,16
4	Penyediaan alat tulis kantor	12.460.000	12.442.600	99,86
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	41.350.000	41.245.000	99,75
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	298.000.000	297.948.000	99,98
7	Penyediaan makan dan minum	6.000.000	5.990.000	99,83
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	198.000.000	196.736.930	99,36
9	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	53.500.000	53.250.000	99,53
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	291.108.000	262.532.500	96,40
10	Pengadaan meubeler	15.100.000	3.600.000	23,84
11	Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	25.000.000	10.650.000	42,60
12	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	59.500.000	59.300.000	99,66
13	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi, alat informasi	3.500.000	3.470.000	99,14
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	77.098.000	75.497.500	97,92
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	2.900.000	2.900.000	100
16	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	6.600.000	6.590.000	99,85
17	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan	78.350.000	28.350.000	100
18	Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset SKPD	23.060.000	23.025.000	99,85
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	97.400.000	25.584.000	26,27
19	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	97.400.000	25.584.000	26,27
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	92.625.000	92.508.000	99,87

20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.610.000	5.569.000	99,27
21	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	7.800.000	7.750.000	99,36
22	Penatausahaan SKPD	79.215.000	79.189.000	99,97
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANAGAN APARATUR	68.500.000	39.717.150	57,98
23	Bimtek Pelayanan Informasi Publik	68.500.000	39.717.150	57,98
V	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	848.895.000	682.316.740	80,38
24	Pengelola Pelayanan Informasi Publik	190.873.000	101.476.225	53,16
25	Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko	73.000.000	63.203.813	86,58
26	Pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	45.871.000	34.773.286	75,81
26	Pengkajian Analisis Pemberitaan	122.701.000	103.813.211	84,62
27	Koordinasi Kehumasan	270.832.000	264.410.900	97,79
27	Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional	146.068.000	114.621.305	78,47
VI	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	2.323.967.000	2.240.399.625	88,91
27	Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah	750.000.000	740.661.550	98,78
28	Penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Media Cetak	748.339.000	739.698.500	98,85
29	Penyebarluasan informasi Melalui Elektronik	360.851.000	304.739.125	84,45
30	Penyebarluasan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	70.961.400	70.488.500	99,33
31	Laporan khusus visualisasi pembangunan	86.336.000	82.550.700	95,62
32	Pembuatan Film Dokumentasi Potensi	35.000.000	33.741.000	96,40
33	Penyebarluasan Informasi melalui Media Ruang	272.480.000	268.520.250	98,54
34	Koordinasi Kehumasan	270.382.000		
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.191.000.000	1.989.119.550	90,76
32	Pengelolaan Website Pemprov. Sumbar	300.000.000	291.497.600	97,17
33	Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom	1.891.000.000	1.697.621.950	89,77
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH	2.463.159.000	1.224.743.520	49,72
34	Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Government Kab/Ko	62.873.000	58.763.115	93,46
35	Implementasi e-Government Pemprov.Sumbar	2.330.434.000	1.097.366.280	47,09
35	Implementasi <i>Mobile Community Access Point</i> (M-CAP)	69.852.016	69.468.125	99,45
38				
Jumlah		9.940.624.000	8.082.971.204	81,31

Sedangkan selama periode tahun 2016-2021, jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 9.940.624.000,- atau sebesar 81,31% dari total anggaran sebesar Rp. Rp. 8.082.971.204,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.26.Pagu dan realisasi anggaran Biro Humas 2016-2021

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	9.940.624.000	8.082.971.204	81,31
2	2017			
3	2018			
4	2019			
5	2020			
6	2021			
JUMLAH		9.940.624.000	8.082.971.204	81,31

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 telah menyajikan sejumlah keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Biro Humas pada tahun anggaran 2016 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum, capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target RPJMN.

Biro Humas yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat, menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat, pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat bersyukur karena hingga penghujung tahun 2016 komunikasi antara pemerintah daerah dan publik dapat terjaga dengan baik hingga tidak bermuara pada perkembangan isu-isu negatif terkait kinerja pemerintah daerah yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan dan stabilitas masyarakat.

Di sisi lain, pada tingkat pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis Biro Humas, meskipun menunjukkan nilai pencapaian yang cukup baik, beberapa indikator kinerja tetap membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan *civil society*. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan kerjasama dan kesepahaman, khususnya di sektor kehumasan.

Padang, Januari 2017
Kepala Biro Humas

Drs. JASMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

